

**Judul** : Alasan lebih efisien & tingginya biaya politik, wacana pilkada lewat DPRD menuai pro kontra  
**Tanggal** : Selasa, 30 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Alasan Lebih Efisien & Tingginya Biaya Politik Wacana Pilkada Lewat DPRD Menuai Pro Kontra

Wacana proses pemilihan pilkada melalui DPRD menjadi perbincangan dan menuai pro kontra di publik. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak.

Sekjen Partai Gerindra, Sugiono termasuk yang mendukung gagasan pilkada lewat DPRD. Ia beralasan, pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien, mulai dari proses atau waktu penjurian kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik, hingga pemungutan suara. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan

pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).

Sugiono menyebut, pada 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun. Angka itu terus meningkat hingga pada 2024 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp 37 triliun. "Ia merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan

dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tuturnya. Berbeda, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menegaskan mengubah mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa dan harus dikaji secara mendalam. "Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat," kritik Said. Senada, Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahuddin mengungkapkan, mayoritas partai

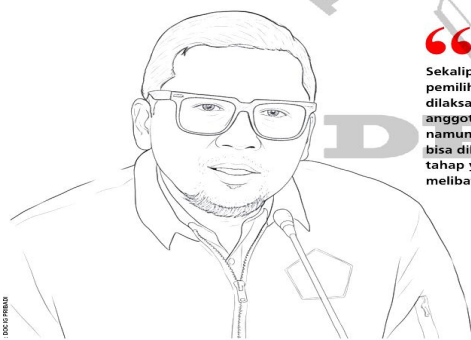
yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menolak pilkada melalui DPRD. "Persoalan-persoalan itu tidak berkorelasi dengan hak rakyat. Masalahnya bukan pada hak memilih, melainkan pada sistem aturan main dan terutama pada pelaksanaannya," ujar Salahuddin. Di tengah polemik mengenai gagasan pilkada melalui DPRD, Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pilkada nanti hanya memilih kepala daerahnya saja, wakilnya tidak. "Saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih

kepala daerahnya saja," usul Doli. Bagaimana tanggapan Kurnas JPPR Rendy Umboh terkait dengan usulan Doli Kurnia? Ia tidak mempermasalahkan jika di dalam pemilihan pilkada nanti hanya memilih kepala daerah saja. "Tidak ada masalah," ujar dia. Yang terpenting adalah pemilihan kepala daerahnya secara langsung, bukan melalui DPRD. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Rendy Umboh dan Ahmad Doli Kurnia terkait wacana di pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja, sementara wakilnya tidak dipilih.

AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, Wakil Ketua Baleg DPR

RENDY UMBOH, Kurnas JPPR

### Pastinya, Rakyat Tetap Akan Dilibatkan Kok... Banyak Yang Salah Tafsirkan Demokrasi



“  
Sekalipun pemilihan akhirnya dilaksanakan oleh anggota DPRD, namun sebelumnya bisa dibuat tahap-tahap yang bisa melibatkan publik.”



“  
Legislatif itu fungsinya hanya tiga yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Bukan memilih eksekutif. Lalu, sekali kalau legislatif memilih eksekutif.”

Anda mengusulkan agar pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja, wakilnya tidak. Bisa Anda jelaskan?

Memang, saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepala daerahnya saja.

Bukan paket, dong? Iya, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah.

Suara sistemnya apakah melalui DPRD atau secara langsung seperti biasanya? Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung.

Menurut Anda, apakah pemilihan hanya kepala daerahnya saja ini dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemilu? Saya kira, karena sistem pilkada harus diatur dalam perundang-undangan, maka semua aturan tersebut juga harus diatur di dalam undang-undang.

Soal rekomendasi dari Partai Golkar, bagaimana? DPP Partai Golkar sebelumnya telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait sistem pemilu, parpol, termasuk pilkada.

Opsi pilkada, bagaimana? Untuk pilkada, tim merekomendasikan ada 3 opsi. Opsi pertama, pelaksanaan pilkada tetap secara langsung seperti saat ini untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Opsi kedua, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Opsi ketiga, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur dan pilkada secara *asimetris hybrid* untuk pemilihan bupati/walikota.

Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.

Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik lainnya yang juga jauh lebih tinggi.

Berarti ada opsi secara langsung? Sementara tetap dimasukkan opsi pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita.

Belakangan, banyak partai yang mendukung pilkada melalui DPRD. Apa catatan Anda? Kami, Tim Kajian Politik, sebenarnya juga sudah mempersiapkan "konsep baru" bila opsi pilkada oleh DPRD. Konsep baru ini berupaya mengkonkretkan dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik *money politics*, dan *vote buying*. ■ REN

Ada usulan dari Wakil Ketua Baleg DPR, jika pilkada nanti yang dipilih hanya kepala daerahnya saja. Apa pendapat Anda?

Kalau pilkada dipilih secara langsung, dan hanya yang dipilih kepala daerah saja, berarti gubernur, bupati, wali kota. Itu tidak ada masalah, dan nggak ada problem konstitusionalnya.

Anda tidak mempermasalahkan jika yang dipilih hanya kepala daerah saja? Tidak ada masalah. Karena memang kalau kita pakai pendekatan konstitusi, maka di konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya pasal 18 ayat 4 itu kan bunyinya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis.

Jadi memang tidak ada nomenklatur terkait wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, atau wakil kepala daerah. Oleh karena itu, apapun desainnya, apakah kepala daerah, dalam hal ini

gubernur, bupati, wali kota, dipilih dia mau berpasangan atau tidak tetap konstitusional.

Asalkan dipilih secara langsung, kan? Iya. Sepanjang dalam tafsir kita adalah dipilih secara langsung, bukan oleh DPRD. Soal desain apakah paket atau hanya kepala daerahnya saja tidak ada masalah.

Selain karena sesuai dengan aturan, faktor apa saja yang membuat Anda setuju jika hanya kepala daerahnya saja yang dipilih? Sejak pertama kali digelar 2005 sampai sekarang, itu selalu konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Gubernur berantem dengan wakil gubernur, bupati dengan wakilnya, wakil wali kota dengan wali kotanya. Dan itu terjadi hampir di semua daerah. Dan konflik itu selalu berujung dari pilkada ke pilkada.

Oleh karena itu baik juga gubernur aja, bupati, wali kota aja yang dipilih secara langsung tidak usah paket. Ya itu tidak ada masalah, tetap konstitusional.

Nah sekarang pertanyaannya, jika nanti gubernur, bupati, wali kotanya ada masalah, digantikan oleh siapa? Jika hal itu terjadi, maka partai politik yang mengusulkan kembali.

Terakhir, apa pesan Anda? Pesan saya, pilkada melalui DPRD jangan lagi dilihat tafsir soal demokratis itu. Dipilih melalui DPRD juga demokratis, itu sebenarnya keliru.

Karena kita tahu bahwa konsep konsep kita kan ada trias politika. Yakni yudikatif, eksekutif dan legislatif. Legislatif itu fungsinya hanya tiga yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Bukan memilih eksekutif. Lalu sekali kalau legislatif memilih eksekutif. ■ REN